

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Khakim, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2014.
- Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004.
- Gunawi Kartasapoetra, *et al.*, *Hukum Perburuhan Pancasila Bidang Pelaksanaan Hubungan Kerja*, Bandung: Amrico, 2008.
- Hans Kelsen. *Dasar-Dasar Hukum Normatif: Prinsip-Prinsip Teoritis untuk Mewujudkan Keadilan dalam Hukum dan Politik*, terjemahan, Bandung: Nusa Media, 2008.
- Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung, Citra Aditya, 2010.
- Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jakarta: Djambatan, 2018.
- Jonker Sihombing, Materi Kuliah (*handout*) Matrikulasi: Tujuan Hukum, Sesi III, Magister Hukum, Universitas Pelita Harapan, Jakarta, 2019, un-published.
- Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cet. Kedua, Jakarta, Kencana, 2014.
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- P. J. Fitzgerald, *Salmond on Jurisprudence*, twelveth ed., Wellington, N.Z.: Universal Law Publishing, 2002.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2017.
- R. Joni Bambang, *Hukum Ketenagakerjaan*, Bandung: Pusaka Setia, 2013.
- R.H. Wiwoho, *Keadilan Berkontrak*, Jakarta: Penaku, 2017.
- Ricardo Simanjuntak, *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Jakarta: Kontan Publishing, 2011.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Kontrak Bisnis: Menurut Sistem Civil Law, Common Law, dan Praktek Dagang Internasional*, Bandung: Mandar Maju, 2003.

_____, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.3, Jakarta: UI-Press, 2010.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, 2008.

Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan ketiga Jakarta, Sinar Grafika, 2011.

B. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-undang tentang Cipta Kerja, UU Nomor 11 Tahun 2020. LN RI: 2020-245; TLN: 6573.

Republik Indonesia, Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, UU Nomor 3 Tahun 2020. LN RI: 2020-147; TLN: 6525.

Republik Indonesia, Undang-undang tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, UU Nomor 18 Tahun 2017. LN RI: 2017-242; TLN: 6141.

Republik Indonesia, Undang-undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, UU Nomor 24 Tahun 2011. LN RI: 2011-116; TLN:5256.

Republik Indonesia, Undang-undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU Nomor 40 Tahun 2004. LN RI: 2004-150; TLN: 4456.

Republik Indonesia, Undang-undang tentang Ketenagakerjaan. UU Nomor 13 Tahun 2003. LN RI: 2003-39; TLN: 4279.

Republik Indonesia, Undang-undang tentang Minyak dan Gas Bumi, UU Nomor 22 Tahun 2001, LN RI: 2001- 136, TLN: 4152.

Republik Indonesia, Undang-undang tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. UU Nomor 21 Tahun 2000. LN RI: 2000-131; TLN: 3989.

Republik Indonesia, Undang-undang tentang Ketenagakerjaan, UU Nomor 25 Tahun 1997. LN RI: 1997; TLN: 3702.

Republik Indonesia, Undang-undang tentang Ketentuan Umum Perpajakan, UU Nomor 6 Tahun 1983. LN RI: 1983.

Republik Indonesia, Undang-undang tentang Keselamatan Kerja, UU Nomor 1 Tahun 1970. LN RI 1972.

Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER-02/MEN/1993 tentang Perjanjian Kerja waktu Tertentu.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER-05/MEN/1995 Tahun 1995 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.

Republik Indonesia, Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Republik Indonesia, Peraturan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembebanan Biaya Pekerja Migran Indonesia.

C. Website

Badan Pusat Statistik, “Berita Resmi Statistik 5 Mei 2020.

Yofriko Sundalangi, “Tinjauan Yuridis Pekerja Freelance berdasarkan Prinsip Keadilan”; Program Studi Kenotariatan, 2017, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar; http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/ODkxZGUzZGE4MmM1NzJIOWI2ZTIINjRINDE5YmEyNDNkZDg0MzM1NQ==.pdf> diakses 12-10-2020.

Rahmat Hisyam Pamady, “Tinjauan Yuridis Hubungan Hukum antara Freelance dengan Para Pihak dalam Situs Web Pasar Kerja Online (Studi Kasus pada Situs Web Sribulancer.com)”; Skripsi, 2019, Universitas Gajah Mada Jogjakarta; <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/168043>> diakses 12-10-2020.

Fadiza Rianty, “Pertanggungjawaban Notaris terhadap Tindakan Hukum yang dilakukan Karyawan Freelance Notaris (Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor: 01/Pts/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/I/2015)”, Tesis, 2015, http://lib.ui.ac.id/file?file=pdf/abstrak/id_abstrak-20433304.pdf> diakses 12-10-2020.

Agusmidah, “Sejarah Hukum Ketenagakerjaan Indonesia”. http://ocw.usu.ac.id/course/download/10430000040-hukum-perburuhan/hk_628_slide_sejarah_hukum_ketenagakerjaan_indonesia.pdf > diakses 14-10-2020.

<https://bp2mi.go.id/berita-detail/bp2mi-berhasil-selamatkan-4-pmi-abk-korban-eksploitasi-di-kapal-ikan-italia>> diakses 19-11-2020.

<https://bp2mi.go.id/berita-detail/upt-bp2mi-denpasar-fasilitasi-pemulangan-pmi-korban-pemberangkatan-nonprosedural>> diakses 19-11-2020.

<https://bp2mi.go.id/berita-detail/upt-bp2mi-jakarta-dampingi-pemulangan-jenazah-pmi-abk>> diakses 19-11-2020.

<https://bp2mi.go.id/berita-detail/upt-bp2mi-makassar-fasilitasi-pemulangan-abk-deportasi-ke-ternate>> diakses 19-11-2020.

<https://bp2mi.go.id/profil-visimisi>> diakses 19-11-2020.

<https://bp2mi.go.id/siaranpers-detail/siaran-pers-gagalkan-7-cpmi-nonprosedural-ke-timur-tengah-kepala-bp2mi-kejahatan-ilegal-terhadap-pmi-masih-terus-berlangsung>> diakses 19-11-2020.

<https://migrantcare.net>> diakses 19-11-2020.

<https://reaktor.co.id/perindungan-hukum-pekerja-freelance-dan-informal-perlu-diperkuat/>> diakses 19-11-2020.

<https://www.geolog.com/our-company/company-overview>> diakses 10-10-2020.

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4227857/harga-minyak-anjlok-10-persen-sentuh-usd-20-per-barel>> diakses 10-10-2020.

<https://www.pertamina.com/>> diakses 10-10-2020.

www.merriam-webster.com/dictionary/freelance> diakses 10-10-2020.

Makky Ananda, “Perbandingan Dasar Hukum Pertambangan dan Hukum Migas”, materi webinar Persatuan Kuasa Hukum Pertambangan Indonesia (PERKHAPI) – Justitia Training Centre, 19 September 2020.

D. Sumber Lainnya

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Perkara Nomor 002/PUU-I/2003

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Perkara Nomor 036/PUU-X/2012

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Perkara Nomor 27/PUU-IX/2011